

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

3.1.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung.

2) Pengamatan (*Observation*)

Peneliti melakukan observasi secara langsung di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung. Hasil observasi menunjukkan bahwa para karyawan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait teknologi informasi. Kurangnya partisipasi mereka dalam merancang atau memilih solusi IT dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara solusi yang diimplementasikan dan kebutuhan sehari-hari mereka. Observasi difokuskan pada dua objek pengamatan yaitu pengamatan SI/TI dan pengamatan pengguna. Pengamatan terhadap SI/TI meliputi fitur, input/output, basis sistem informasi (desktop based atau web based), topologi jaringan dan proses bisnis sistem informasi. Sedangkan pengamatan terhadap pengelola dan pengguna meliputi alur kerja penggunaan sistem, SOP dan uraian tugas.

3) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menggunakan data melalui sumber-sumber bacaan yang terkait dengan sistem yang akan dibangun, seperti buku (Sistem Informasi, dan UML), jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3.1.2 Metode Pengembangan Sistem

The Open Group Architecture Framework(TOGAF), yang menggunakan metode pengembangan arsitektur *Architecture Development Method*(ADM) sebagai metode

pengembangan arsitektur, adalah kerangka *Enterprise Arsitekture* (EA) yang sekarang menjadi acuan ketika membahas pemodelan arsitektur bisnis. Perencanaan strategis pada domain SI/TI di modelkan menggunakan TOGAF ADM dengan tahapan yang berbeda-beda dalam setiap tahapan ADM disesuaikan dengan kebutuhan bidang kajian. ADM adalah metodologi pengembangan arsitektur, yang dirancang untuk kebutuhan sistem dan organisasi. TOGAF ADM menjelaskan pengembangan, migrasi dan pengelolaan kerangka arsitektur. Tahapan tersebut diulangi agar organisasi dapat terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan bisnisnya. Implementasi TOGAF ADM pada penelitian ini akan di mulai dengan tahap *Preliminary fase* dan dilanjutkan sampai pada *Migration and Planning*. Rancangan arsitektur penelitian ini akan menggunakan dan mengimplementasikan masing-masing fase TOGAF ADM yang tercantum di bawah ini. Tools pemodelan pada TOGAF dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tools Pemodelan pada TOGAF

Fase ADM	Tools
M	
<i>Preliminary</i>	<i>Principle catalog</i>
<i>Architecture Vision</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Value chain</i> 2. <i>Stakholder map matrix</i> 3. <i>Solution concept diagram</i>
<i>Business Architecture</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Rich picture</i> 2. <i>Actor/ role matrix</i>
<i>Information System Architecture (Application & data)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Application portfolio catalog</i> 2. <i>Use case diagram</i> 3. <i>Class diagram</i>
<i>Technology Architecture</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Communication diagram</i> 2. <i>Technology portfolio catalog</i>
<i>Opportunities and Solutions</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Matrix gap analysis</i>
<i>Migration and Planning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Roadmap</i>

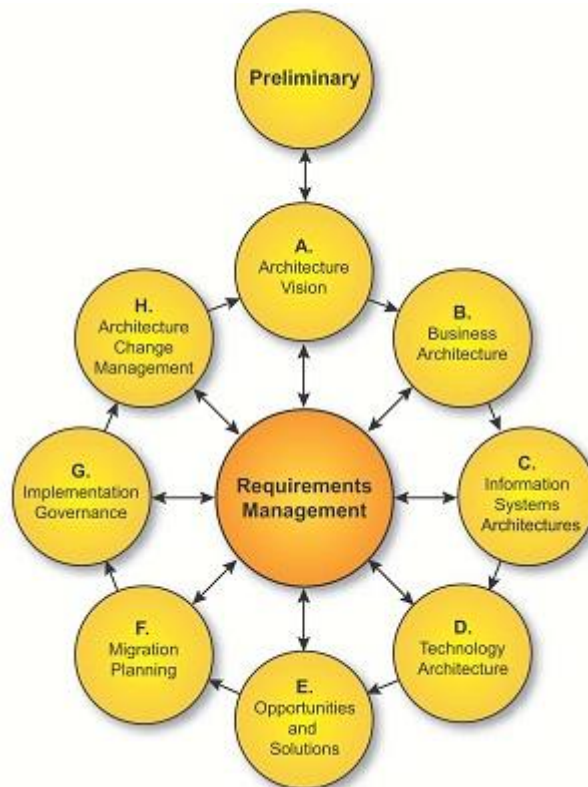
1. Preliminary Phase

Pada tahap ini menjelaskan persiapan awal dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai

tujuan bisnis arsitektur *enterprise* baru, termasuk mendefinisikan *framework* dan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuan phase *preliminary* ialah mengoptimalkan atau mengasah kemampuan yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Dalam *preliminary phase* ini akan menganalisa:

1. Ruang lingkup *arsitektur* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung
2. Menyiapkan perangkat arsitektur untuk fase visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur system informasi, dan arsitektur teknologi yang akan digunakan pada fase selanjutnya,
3. Menggunakan konsep perencanaan sebagai pedoman perancangan arsitektur dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja karyawan.

1. Phase A: Architecture Vision



Pada tahap ini persyaratan untuk membangun arsitektur akan ditentukan selama fase ini, serta visi arsitektur untuk perancangan system informasi dan teknologi informasi(SI/TI).Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Menjelaskan visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung,
2. Membangun visi arsitektur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar

Lampung,

3. Membuat konsep rancangan arsitektur visi dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

2. Phase B: BusinessArchitecture

Pada tahap ini proses bisnis saat ini akan dijelaskan dan dipahami selama fase ini. Tujuan yang dicapai pada fase ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang arsitektur bisnis fundamental,
2. Membuat tujuan untuk arsitektur bisnis, menyusun rencana untuk menciptakan layanan SI/TI, serta komponen organisasi, fungsional, dan geografis dari lingkungan Pendidikan berdasarkan prinsip, tujuan, dan penggerak strategis,
3. Menentukan GAP antara tujuan dan arsitektur saat ini,
4. Memilih sudut pandang terkait yang memungkinkan arsitek menunjukkan bagaimana niat pemangku kepentingan dapat dipenuhi dalam arsitektur bisnis,
5. Memilih alat dan metode yang tepat untuk diterapkan pada sudut pandang yang dipilih.

3. Phase C: Information System Architecture

Pada tahap ini, lebih banyak perhatian diberikan pada kegiatan merancang arsitektur sistem informasi. Perancangan arsitektur data merupakan kebutuhan data yang akan digunakan dalam arsitektur aplikasi. Berdasarkan proses bisnis yang dirancang di seluruh rantai nilai/*valuechain*, beberapa *entitas* telah diidentifikasi untuk mengetahui kebutuhan akan arsitektur data yang dirancang yang harus selaras dengan proses bisnis akademik. Arsitektur data dan arsitektur rancangan sistem yang akan digunakan dalam perancangan SI/TI di definisikan sebagai bagian dari arsitektur sistem informasi pada tahap ini. Persyaratan fungsi bisnis, proses, dan layanan diberikan lebih banyak perhatian dalam arsitektur data.

4. Phase D: TechnologyArchitecture

Dalam tahapan ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi platform teknologi saat ini untuk perancangan SI/TI dan untuk mengusulkan platform teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan rancangan SI/TI Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Tindakan ini dilakukan selama fase ini:

1. Membuat model arsitektur dari building block,

2. Melengkapi definisi arsitektur.

5. Phase E: Opportunities and Solutions

Pada fase ini digunakan untuk menilai arsitektur bisnis, arsitektur system informasi (aplikasi dan data), dan arsitektur teknologi masing-masing pada tahap B, C, dan D, sehingga menjadi dasar bagi pemangku kepentingan untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Sebuah rencana untuk mengimplementasikan arsitektur juga akan ditetapkan selama fase ini. Langkah-langkah dalam fase peluang dan solusi adalah sebagai berikut:

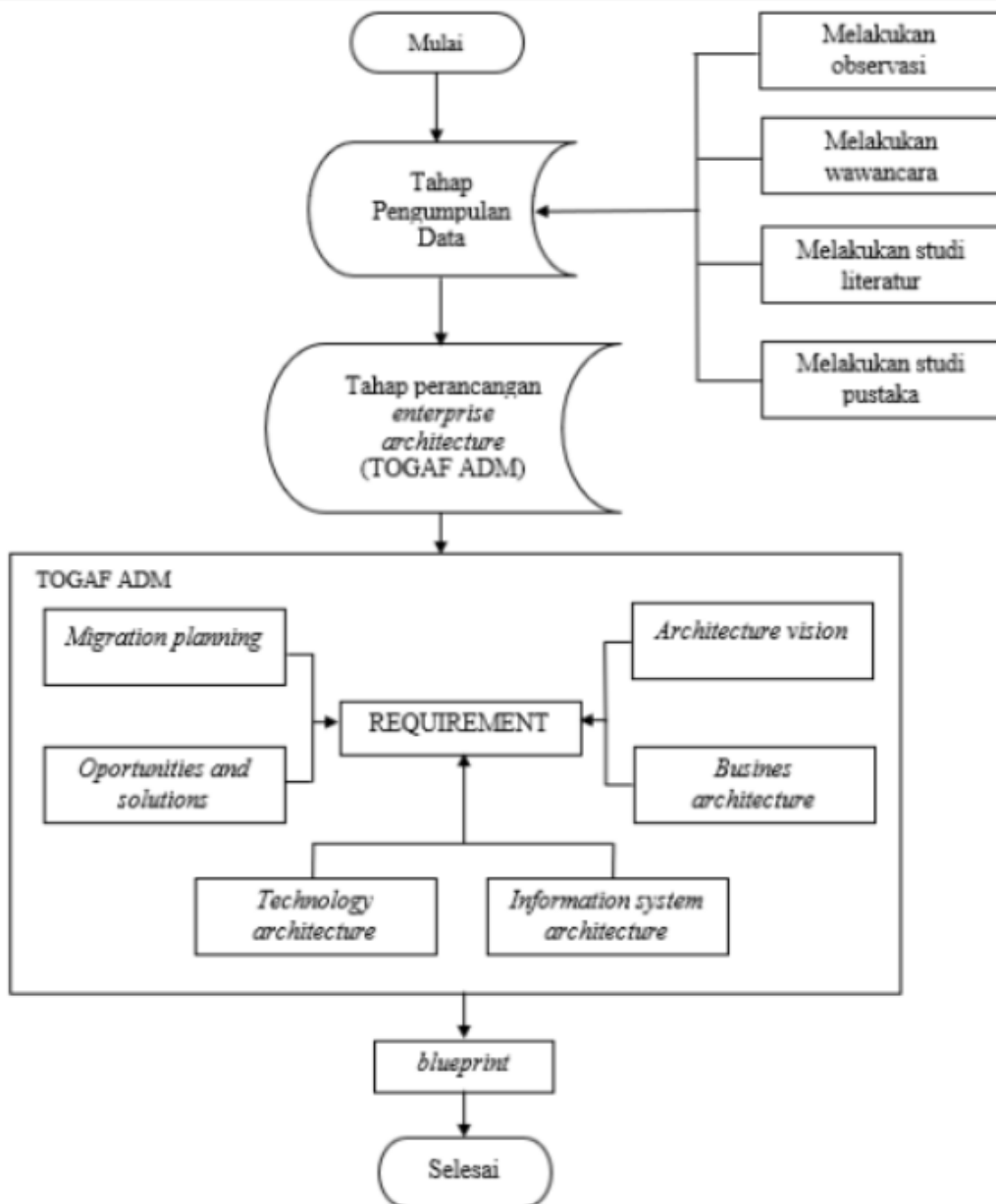
1. Mengevaluasi gap dari model arsitektur yang di buat pada fase B, C, dan D yaitu arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi (aplikasi dan data)
2. Menggunakan analisis kesenjangan matriks untuk menemukan keterkaitan antara arsitektur data antara arsitektur aplikasi dan teknologi.

6. Phase F: Migration Planning

Tujuan dari fase ini adalah menyiapkan migrasi yang menghasilkan pemahaman tentang aplikasi sehingga pengguna dapat memanfaatkannya. Tindakan berikut akan diambil selama fase perencanaan migrasi:

1. Sesuai dengan prioritas dari banyak sudut (sudut manajemen dan operasional) dan keunggulan arsitektur migrasi,
2. Arsitektur prioritas yang akan di jalankan untuk menjadi dasar bagi perencanaan implementasi dan perencanaan migrasi yang ekstensif,
3. Membuat rencana implementasi arsitektur SI/TI.

Langkah berikutnya setelah semua fase dalam TOGAF ADM sudah ditentukan maka selanjutnya adalah Alur penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur dalam penelitian yang akan dilakukan seperti terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar3.1. Alur Penelitian

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu langkah yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, objek penelitian, definisi operasional, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Berikut ini merupakan penjabaran mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian mengenai kajian tingkat ketercapaian implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengidentifikasi serta mengukur ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Dalam meneliti kebijakan *smart governance* di Kota Bandarlampung, penelitian berfokus pada analisis proses kebijakan. Analisis proses kebijakan adalah analisis yang berfokus pada teknik dan penelitian untuk mengetahui proses pembentukan kebijakan, yang mencakup pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. (Davies dkk, 2000).

Dalam melakukan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terkait *smart governance* berbentuk pendekatan deduktif. Menurut Zainuddin (2018), Pendekatan deduktif adalah pendekatan terhadap teori, kasus dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Melalui pendekatan deduktif, diharapkan pertanyaan penelitian terjawab dengan melakukan pengumpulan variabel yang diperoleh dari sintesis literatur sebagai dasar penelitian.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang disebut sebagai metode campuran (*mixed method*), dimana metode campuran merupakan suatu metode untuk mengkolaborasikan data kuantitatif dan kualitatif, seperti digabung dalam satu basis data, agar dapat digunakan untuk memeriksa akurasi (validitas) dari basis data lain. (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Gunawan (2013) menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan metode yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dilakukan untuk menjawab sasaran mengenai identifikasi program-program *smart governance* yang telah berjalan di Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Penelitian kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori yang

ada dengan cara meneliti hubungan antar variabel, metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung dengan metode skoring dengan cara memberikan skor bagi tiap-tiap indikator untuk menentukan tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung yang dijelaskan lebih lanjut menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan elemen yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kelembagaan dan program *smart governance*, dengan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi objek penelitian.

3.2.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan terkait substansi materi yang berkaitan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memudahkan pemahaman terkait substansi dalam penelitian ini. Selain itu, definisi operasional digunakan untuk mengetahui jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Adapun definisi operasional pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

3.2.3.1 Smart City

Smart city atau kota cerdas adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi tata kelola kota, penyebaran informasi dengan publik dan memberikan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga yang lebih baik.

3.2.3.2 Smart Governance

Smart governance merupakan salah satu dimensi dari *smart city*, yaitu sebuah konsep tata kelola yang mengandalkan prinsip transparansi, akuntabel, kolaboratif, dan partisipatif. *Smart governance* dapat diimplementasikan dengan pengintegrasian teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola cerdas.

3.2.3.3 *Electronic Government (e-Government)*

E-Government adalah proses tata kelola cerdas yang diimplementasikan dengan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) baik oleh sektor publik maupun sektor privat dan non-privat untuk mendukung operasional pemerintahan, menciptakan partisipasi warga, dan penyediaan layanan pemerintah yang terbuka.

3.2.3.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting untuk memperoleh data-data terkait dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data terbagi dalam dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dilakukan dalam proses analisis untuk menjawab semua pertanyaan dalam mencapai tujuan dari penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat berada di lapangan. Data primer dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data yang tidak dapat ditemukan pada data sekunder. Tingkat objektif penelitian menjadi dasar dalam pengumpulan data primer ini yang diharapkan mampu menghasilkan keluaran penelitian yang presisi dan sesuai data atau kondisi sebenarnya di lapangan. Kebutuhan data primer didapatkan melalui cara-cara berikut ini:

A. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Soegijono (1993), menyatakan bahwa wawancara merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. wawancara dapat pula dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya

jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sementara wawancara mendalam adalah wawancara berdurasi panjang, tatap muka, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dikenal sebagai metode penggalan informasi yang lebih rinci atau cara memahami secara mendalam mengenai suatu subjek atau konsep (Showkat & Parveen, 2017). Wawancara mendalam akan dilakukan untuk memenuhi dan menjawab sasaran kedua dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi penerapan *smart governance* di Kota Bandar Lampung, yang dilakukan kepada dinas-dinas terkait pengembangan *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan dinas-dinas yang akan diwawancara dalam menjawab sasaran penelitian:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandarlampung

Diskominfo Kota Bandarlampung dipilih atas dasar visi Diskominfo Kota Bandarlampung yaitu “Penerapan Kinerja Optimal Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing” dengan misi yang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip *smart governance*. Selain itu, Diskominfo merupakan Dinas utama dalam pengelolaan *smart governance* dalam bentuk *e-government*.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung

Bappeda Kota Bandar Lampung dipilih atas dasar tugas utama Bappeda sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan daerah di Kota Bandar Lampung. Kedudukan Bappeda akan sangat terkait dengan *smart governance*, khususnya dalam efisiensi kebijakan publik dimana dibutuhkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung

Disdukcapil Kota Bandar Lampung menjadi salah satu dinas pelayanan masyarakat dalam urusan administrasi yang berfokus pada perumusan kebijakan teknis serta penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Disdukcapil menjadi salah satu pengimplementasi utama *smart governance*, Hal ini karena Disdukcapil bertindak dalam penyediaan

pelayanan publik dasar bagi masyarakat dalam bentuk pencatatan administrasi.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

DPM-PTSP Kota Bandar Lampung dipilih karena memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. DPM-PTSP merupakan pelaksana implementasi *smart governance* dengan tugas utama pelayanan publik dasar dalam bagian perizinan.

5. Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung

Setda Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai staf pendukung walikota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Sehingga dapat melihat aspek-aspek *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Sekretariat Daerah Bandar Lampung juga membawahi Badan Hukum Kota Bandarlampung yang menjadi penyedia transparansi produk hukum.

Tabel 3.2 Kebutuhan Data Primer Penelitian

Sasaran	Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Dinas/Instansi yang Dituju	Instrumen Survei
Mengetahui kebijakan <i>smart governance</i> yang telah diterapkan dan mengidentifikasi tingkat ketercapaian	Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Publik secara Daring	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung Disdukcapil Kota Bandar Lampung DPM-PTSP Kota Bandar Lampung	1. Laptop
		Fasilitas Kebutuhan Dasar	Sarana Pemantauan Kebutuhan Dasar	-	-	2. Alat Tulis
			Rasio Elektrifikasi	-	-	3. Daftar
		Fasilitas Layanan Utilitas	<i>Persentase Ketersediaan WiFi (Hotspot)</i>	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung Bappeda Kota Bandar Lampung	Kebutuhan Data
			Persentase Rumah Tangga yang	-	-	4. Daftar Pertanyaan

kebijakan <i>smart governance</i> di Kota Bandar Lampung			Terhubung ke Internet			5. Telepon Genggam
	Birokrasi Pemerintah	Kebijakan dan Strategi Perencanaan	Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan</i>) <i>Smart city</i>	Wawancara	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung	
			Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan</i>) <i>Smart governance</i>	Wawancara	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung	
			Kebijakan Internal SPBE	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung	

			Anggaran dan Belanja TIK	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung
		Tata Kelola Birokrasi	Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik seperti: Layanan manajemen dokumen, Perencanaan dan penganggaran, Layanan manajemen keuangan, Layanan pengadaan, Layanan manajemen kinerja, Layanan manajemen staf	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung
			Sistem Pelaporan Pelanggaran	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung
			Operasi pusat data dan Integrasi sistem (aplikasi)	Wawancara	Diskominfo Kota Bandar Lampung
	Efisiensi	Kebijakan Demokrasi dan Aspirasi Publik	Ketersediaan situs yang mengakomodasi pelaporan publik	Wawancara	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung
			Ketersediaan situs yang mengakomodasi aspirasi publik	Wawancara	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo

	i Kebijakan an Publik		dalam pembuatan kebijakan		Kota Bandar Lampung
		Transparansi Peraturan Pemerintah	Ketersediaan sistem informasi kebijakan pemerintah (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – JDIH)	Wawancara	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Tabel 3.3 Kebutuhan Data Sekunder Penelitian

Sasaran	Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Dokumen/Literatur	Dinas/Instansi yang Dituju	Instrumen Survei
Mengetahui kebijakan <i>smart governance</i> yang telah diterapkan dan	Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Publik secara Daring	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data pelayanan publik daring Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung Disdukcapil Kota Bandar Lampung DPM-PTSP Kota Bandar Lampung	1. Laptop 2. Alat Tulis 3. Daftar Kebutuhan Data
		Fasilitas	Sarana Pemantauan Kebutuhan Dasar	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data sarana pemantauan kebutuhan dasar Kota Bandar Lampung	Dinas Pangan Kota Bandar Lampung	

mengidentifikasi tingkat ketercapaian kebijakan <i>smart governance</i> di Kota Bandar Lampung	Kebutuhan Dasar	Rasio Elektrifikasi	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data rasio elektrifikasi di Kota Bandar Lampung	Dinas ESDM Provinsi Lampung	4. Daftar Pertanyaan	
		Ketersediaan Air Bersih	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data persentase ketersediaan air bersih di Kota Bandar Lampung	Bappeda Kota Bandar Lampung		5. Telepon Genggam
		Fasilitas Layanan Utilitas	Persentase Ketersediaan WiFi (<i>Hotspot</i>)	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data Persentase Ketersediaan WiFi (<i>Hotspot</i>)	Diskominfo Kota Bandar Lampung Bappeda Kota Bandar Lampung	
	Persentase Rumah Tangga yang Terhubung ke Internet		Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data Persentase Rumah Tangga yang Terhubung ke Internet	Diskominfo Kota Bandar Lampung Bappeda Kota Bandar Lampung		
	Birokrasi Pemerintah	Kebijakan dan Strategi Perencanaan	Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan Smart city</i>)	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Cetak biru (<i>blueprint smart city</i>) Kota Bandar Lampung	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung	

			Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan Smart governance</i>)	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Cetak biru (<i>blueprint smart governance</i>) Kota Bandar Lampung	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung	
			Kebijakan Internal SPBE	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data Kebijakan Internal Layanan dan Tata Kelola SPBE Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung	
			Anggaran dan Belanja TIK	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Anggaran dan Belanja TIK	Diskominfo Kota Bandar Lampung	
			Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik seperti: Layanan manajemen	Kajian Literatur	Data Layanan Pemerintah Berbasis	Diskominfo Kota	

	Tata Kelola Birokrasi	dokumen, Perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan, pengadaan, manajemen kinerja, manajemen staf	Kajian Dokumen	Elektronik	Bandar Lampung
		Sistem Pelaporan Pelanggaran	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data Sistem Whistleblowing Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
		Operasi pusat data dan Integrasi sistem (aplikasi)	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data Pengoperasian Pusat Data (Data center operations) Kota Bandar Lampung	Diskominfo Kota Bandar Lampung
	Efisien	Kebijakan Demokrasi	Ketersediaan situs yang mengakomodasi pelaporan publik	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data situs akomodasi pelaporan publik Kota Bandar Lampung

si Kebija kan Publik	dan Aspirasi Publik				Bandar Lampung
		Ketersediaan situs yang mengakomodasi aspirasi publik dalam pembuatan kebijakan	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data situs akomodasi aspirasi publik dalam pembuatan kebijakan Kota Bandar Lampung	Bappeda Kota Bandar Lampung Diskominfo Kota Bandar Lampung
	Transparansi Peraturan Pemerintah	Ketersediaan sistem informasi kebijakan pemerintah (Sistem	Kajian Literatur Kajian Dokumen	Data JDIH Kota Bandar Lampung	Bappeda Kota Bandar Lampung

		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – JDIH)			Diskominfo Kota Bandar Lampung	
--	--	--	--	--	---	--

3.2.5 Teknik *Sampling Data*

Dalam proses pengumpulan data, diperlukan penentuan dan penemuan orang atau lokasi yang akan dipelajari sesuai dengan fokus dari suatu penelitian itu sendiri. Teknik data sampling adalah cara dalam menentukan sampel yang akan dijadikan sebagai sumber pengambilan data yang sesungguhnya, dengan memperhatikan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi (Margono, 2004). Dengan menentukan sampel yang tepat, diharapkan data yang diambil untuk penelitian akan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penentuan teknik penentuan sampel, terdapat dua jenis teknik yaitu teknik *probability sampling* dan *non-probability sampling*. Namun pada penelitian kali ini, teknik yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling*. Menurut Sugiyono (2014), teknik *non-probability sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel yang tidak semua orang dari populasi dapat dipilih menjadi sampel dalam penelitian. Teknik *non-probability sampling* yang digunakan terdiri atas *purposive sampling* dan *snowballing sampling*.

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menguji tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung dengan melakukan wawancara kepada pemangku kebijakan terkait pengembangan *smart governance*. Wawancara yang dilakukan akan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan kepada sampel-sampel tertentu yang dapat mewakili populasi dan memiliki karakteristik tertentu.

Menurut Nurdiani (2014), teknik *snowball sampling* merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Dalam penelitian ini, teknik *snowball sampling* dilakukan untuk terus menambah jumlah sumber data dengan mencari sampel dengan karakteristik yang sama, melalui rekomendasi sampel sebelumnya yang telah diteliti. Sehingga sumber sampel data yang sebelumnya sedikit, seiring waktu menjadi besar.

Kriteria sampel yang akan dipakai dalam penerapan *purposive sampling* untuk penelitian mengenai *smart governance* ini adalah:

3.2.5.1 Menguasai dan memahami kondisi pengembangan *smart city*

dalam dimensi *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

3.2.5.2 Memiliki keterlibatan dalam pengembangan konsep *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

3.2.5.3 Merupakan pelaksana implementasi *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

Kriteria yang telah disebutkan akan menjadi kriteria-kriteria yang digunakan pula dalam snowball sampling, sehingga data yang dihasilkan tetap akurat dan dapat menjawab sasaran-sasaran penelitian.

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, Berikut merupakan daftar narasumber yang telah dipilih untuk diwawancarai oleh peneliti, Wawancara dengan narasumber dilakukan untuk mengetahui kondisi rencana dan eksisting *smart governance* yang sedang berlangsung di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.4 Profil Responden Terkait Smart Governance di Kota Bandarlampung

No	Nama Informan	Kedudukan
1	Ahmad Sarladi	Plt. Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung
2	Krisna Laksamana, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang E-Governance Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung
3	Mario	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung
4	Ahmad Kholid, S.SI.	Tenaga Ahli IT Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung
5	Dewi Kartika, S.E., M.M.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung
6	Febriana, S.STP., M.IP.	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung

7	Nur Lailawati,S.Sos., M.M.	Kasi Bidang Statistik Sektoral - Fungsional Statistisi Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung
---	-------------------------------	--

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

3.2.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah langkah dalam mengolah data primer dan data sekunder yang telah didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai evaluasi *smart city* pada dimensi *smart governance* di Kota Bandar Lampung menggunakan tiga teknik analisis, yaitu analisis konten, analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif dan analisis skoring. Berikut merupakan penjabaran mengenai analisis yang digunakan di setiap sasaran dalam penelitian ini.

Sasaran 1: Mengetahui kebijakan *smart governance* yang telah diterapkan di Kota Bandar Lampung

Cresswell dalam Habsy (2017), menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Pada penelitian ini, identifikasi kebijakan *smart governance* yang telah diterapkan di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan analisis melalui data yang digunakan berasal dari wawancara secara mendalam kepada masing-masing instansi yang memegang kepentingan dalam pengembangan *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

Analisis konten adalah studi tentang dokumen dan teks dari berbagai format, gambar, audio atau video. Analisis konten digunakan dalam menganalisis fenomena sosial yang sifatnya non-invasif. Setelah sebelumnya dilakukan wawancara dan mendapatkan data primer serta sekunder mengenai kebijakan *smart governance* di kota Bandar Lampung, maka akan dilakukan analisis konten untuk mengambil poin-poin penting yang dapat memberikan informasi mengenai penerapan *smart governance* di kota Bandar Lampung.

Sedangkan analisis deskriptif kualitatif menurut Winartha (2006) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai keadaan dari berbagai data yang telah dikumpulkan, baik

dari hasil wawancara maupun observasi secara langsung. Dengan teknik analisis ini, akan dijabarkan kebijakan-kebijakan *smart governance* yang telah diterapkan di Kota Bandar Lampung, maupun kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah dalam penerapan *smart governance* di kota Bandar Lampung.

Sasaran 2: Mengidentifikasi tingkat ketercapaian Kota Bandar Lampung dalam menerapkan *smart governance*

Analisis konten adalah studi tentang dokumen dan teks dari berbagai format, gambar, audio atau video. Analisis konten digunakan dalam menganalisis fenomena sosial yang sifatnya non-invasif. Analisis konten pada sasaran kedua ini digunakan untuk mengambil poin-poin penting pada hasil wawancara yang telah diubah menjadi transkrip.

Indikator-indikator yang menjadi alat identifikasi tingkat keberhasilan *smart governance* di Kota Bandar Lampung didapatkan melalui dokumen-dokumen dan tinjauan literatur yang didapatkan dan dirumuskan dalam poin-poin yang pada nantinya akan berkesinambungan dengan teknik analisis selanjutnya, yaitu analisis skoring.

Metode skoring adalah teknik analisis data kuantitatif yang digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing karakteristik parameter dari sub-sub variabel agar dapat dihitung nilainya serta dapat ditentukan peringkatnya (Gunawan dkk, 2014). Metode analisis skoring pada penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandarlampung. Dimana diperlukan kriteria dan indikator yang sebelumnya telah dirumuskan melalui analisis konten.

Dalam analisis skoring, skor masing-masing variabel maupun subvariabel diasumsikan memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga tidak dilakukan analisis lebih lanjut dalam pemberian bobot tingkat kepentingan. Kerangka yang digunakan menjadi dasar untuk metode skoring merupakan *Garuda Smart City Model (GSCM)*.

Selanjutnya evaluasi *smart governance* dilakukan dengan analisis skoring secara kuantitatif. Melalui penilaian masing-masing indikator pada masing-masing

kriteria yang kemudian dirata-ratakan hasil penjumlahan tersebut, dapat diketahuinya tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Penentuan skor didasarkan pada kriteria-kriteria seperti penyediaan, fungsionalitas, rasio ketersediaan, cakupan layanan, penerapan, serta realisasi.

Dalam penentuan nilai minimal dan maksimal skor, dilakukan penyesuaian dengan model tingkat kematangan *smart governance* yang dibagi atas lima tahap atau level, yaitu: (1) *Ad-Hoc*, (2) *Initial*, (3) *Scattered*, (4) *Integrated*, dan (5) *Smart*.

- 3.2.6.1 *Ad-Hoc*, tahap dimana belum terdapat inisiatif kota cerdas dalam konteks *smart governance* dimana pengelolaannya masih dalam bentuk proses konvensional dan tidak didukung rencana pengelolaan yang baik.
- 3.2.6.2 *Initial*, tahap dimana terdapat pengelolaan *smart governance*, sudah terdapat rencana pengelolaan namun proses pelayanannya masih parsial ataupun belum maksimal.
- 3.2.6.3 *Scattered*, pada tahap ini berbagai sektor dan sistem dalam mendukung inisiatif *smart governance* telah diimplementasikan namun belum didukung operasional yang baik sehingga terjadi implementasi yang tidak terpusat.
- 3.2.6.4 *Integrated*, tahap terbentuknya *smart governance* dengan baik baik dalam segi operasional, monitoring, evaluasi, dan perbaikan terus-menerus, serta menunjukkan kolaborasi antar sistem dan operasional.
- 3.2.6.5 *Smart*, pada tahap ini *smart governance* telah memiliki sistem rencana, pengembangan, operasional, dan *monitoring* yang menyeluruh. Serta akses layanan publik berfungsi dengan sangat baik dan dapat diakses dari mana saja.

Sementara kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai minimal dan maksimal pembobotan skor disesuaikan dengan skala pengukuran indikator- indikator penentu tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Tahap akhir dari tahap skoring adalah penghitungan rata-rata skor di tiap-tiap variabel, dan penghitungan rata-rata skor keseluruhan, sehingga dapat ditentukan tingkat ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung. Untuk melihat lebih lanjut cara pembobotan atau pemberian skor yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Skoring Penelitian

Sasaran	Variabel	Sub-Variabel	Deskripsi	Indikator	Min-Max Skor	Bobot Skor
Mengetahui kebijakan <i>smart governance</i> yang telah diterapkan dan mengidentifikasi	Pelaya	Pelayanan Administrasi	Pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan, administrasi pemerintahan dan kewarganegaraan.	Pelayanan Publik secara Daring	Tahap 1: Persentase <20% Tahap 2: Persentase 20% - 40% Tahap 3: Persentase 41% - 60% Tahap 4: Persentase 61% - 80% Tahap 5: Persentase >80%	Skor Indikator Pelayanan Publik
				Sarana Pemantauan Kebutuhan Dasar	Tahap 1: Tidak ada Tahap 2: Terdapat rencana Tahap 3: Ada, dalam bentuk manual Tahap 4: Ada, sudah dalam bentuk online Tahap 5: Ada, sudah dalam bentuk online dan real time	

ikasi tingkat ketercapaian kebijakan <i>smart governance</i> di Kota Bandarlamp ung	nan Publi k	Fasilita s Kebutu han Dasar	Fasilitas yang menggambarkan penyediaan dan pemantauan kebutuhan dasar dalam suatu kota terkait <i>smart governance</i>	Rasio Elektrifikasi	Tahap 1: Persentase <20% Tahap 2: Persentase 20% - 40% Tahap 3: Persentase 41% - 60% Tahap 4: Persentase 61% - 80% Tahap 5: Persentase >80%	(A+B+C+D+E) <hr/> 5
				Ketersediaa n Air Bersih	Tahap 1: Persentase <20% Tahap 2: Persentase 20% - 40% Tahap 3: Persentase 41% - 60% Tahap 4: Persentase 61% - 80% Tahap 5: Persentase >80%	

		Fasilitas Layanan Utilitas	Fasilitas yang menggambarkan penyediaan jasa pokok bagi masyarakat dalam bentuk jaringan telekomunikasi.	<i>Persentase Ketersediaan WiFi (Hotspot)</i>	Tahap 1: Persentase <20% Tahap 2: Persentase 20% - 40% Tahap 3: Persentase 41% - 60% Tahap 4: Persentase 61% - 80% Tahap 5: Persentase >80%	
				Persentase Rumah Tangga yang Terhubung ke Internet	Tahap 1: Persentase <20% Tahap 2: Persentase 20% - 40% Tahap 3: Persentase 41% - 60% Tahap 4: Persentase 61% - 80% Tahap 5: Persentase >80%	
		Kebijakan		Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan</i>) <i>Smart city</i>	Tahap 1: Tidak tersedianya dokumen yang mencakup masterplan <i>smart city</i> Tahap 2: Tersedia Sebagian dokumen yang mencakup masterplan <i>smart city</i> Tahap 3: Tersedianya secara lengkap dokumen yang mencakup masterplan <i>smart city</i> Tahap 4: Tersedianya dokumen masterplan	

Birokrasi Pemerintah	an dan Strategi Perencanaan Strategi dan Perencanaan	Kebijakan dan program terkait rencana dan pengimplementasi an <i>smart city dan smart governance</i> .		<i>smart city</i> dan diterapkan dan dan dipantau secara berkala Tahap 5: Tersedianya dokumen masterplan <i>smart city</i> dan diterapkan dan dan dipantau secara berkala serta dilakukan evaluasi	Skor Indikator Birokrasi Pemerintah (A+B+C+D+E+F+G) <hr/> 7
			Ketersediaan Rencana (<i>Masterplan</i>) <i>Smart governance</i>	Tahap 1: Tidak tersedianya dokumen yang mencakup masterplan <i>smart governance</i> Tahap 2: Tersedia Sebagian dokumen yang mencakup masterplan <i>smart governance</i> Tahap 3: Tersedianya secara lengkap dokumen yang mencakup masterplan <i>smart governance</i> Tahap 4: Tersedianya dokumen masterplan <i>smart governance</i> dan diterapkan dan dan dipantau secara berkala Tahap 5: Tersedianya dokumen masterplan <i>smart governance</i> dan diterapkan dan dan dipantau secara berkala serta dilakukan evaluasi	

				<p>Kebijakan Internal SPBE</p> <p>Tahap 1: Persentase <20%</p> <p>Tahap 2: Persentase 20% - 40%</p> <p>Tahap 3: Persentase 41% - 60%</p> <p>Tahap 4: Persentase 61% - 80%</p> <p>Tahap 5: Persentase >80%</p>	
			<p>Anggaran dan Belanja TIK</p> <p>Tahap 1: Tersedianya anggaran dan belanja TIK, tanpa ada prioritas untuk <i>smart city</i></p> <p>Tahap 2: Tersedianya anggaran dan belanja TIK dialokasikan untuk <i>smart city</i>.</p> <p>Tahap 3: Tersedianya anggaran dan belanja TIK dialokasikan untuk <i>smart city</i> yang tercermin dalam program di berbagai proyek.</p> <p>Tahap 4: Terealisasinya anggaran dan belanja TIK dalam berbagai program dan proyek <i>smart city</i></p> <p>Tahap 5: Penganggaran dan Belanja TIK terkait <i>smart city</i> telah terealisasi dan ditindaklanjuti untuk evaluasi kedepannya</p>		

			<p>Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan manajemen dokumen • Perencanaan dan penganggaran • Layanan manajemen keuangan • Layanan pengadaan 	<p>Tahap 1: Persentase <20%</p> <p>Tahap 2: Persentase 20% - 40%</p> <p>Tahap 3: Persentase 41% - 60%</p> <p>Tahap 4: Persentase 61% - 80%</p> <p>Tahap 5: Persentase >80%</p>
		Tata Kelola Birokrasi	<p>Sistem penunjang kelembagaan dalam suatu tata kelola pemerintahan.</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • Layanan manajemen kinerja • Layanan manajemen staf 	
			<p>Sistem Pelaporan Pelanggaran</p>	<p>Tahap 1: Tidak ada WBS (Whistleblowing System) Tahap 2: Terdapat layanan interaksi WBS seperti mencari informasi dan penyampaian laporan</p> <p>Tahap 3: WBS dapat merespon pengguna dalam penyelesaian dan resolusi laporan</p> <p>Tahap 4: WBS menyediakan integrasi layanan ke layanan lain seperti manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE lain</p> <p>Tahap 5: WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan perubahan lingkungan (kerja), teknologi dan</p>	

				kebutuhan instansi.
			Operasi pusat data dan Integrasi sistem (aplikasi)	<p>Tahap 1: Tidak Ada operasi pusat data dan integrasi sistem aplikasi</p> <p>Tahap 2: Tersedia pusat data yang dimiliki instansi pemerintah dan sudah dimanfaatkan oleh sebagian perangkat daerah, dan pengendalian layanan masih terdapat di beberapa perangkat daerah</p> <p>Tahap 3: Prosedur penggunaan pusat data telah diterapkan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.</p> <p>Tahap 4: Pengendalian pusat data dan sistem layanan. serta monitoring perencanaan dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaman pusat data</p> <p>Tahap 5: Kinerja pengoperasian pusat data dan sistem layanan telah dilakukan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi</p>

Efisiensi Kebijakan Publik	Kebijakan Demokrasi	Penciptaan masyarakat yang partisipatif dengan memberikan	Ketersediaan situs yang mengakomodasi pelaporan publik	Tahap 1: Tidak ada atau sistem pengaduan publik Tahap 2: Sistem pengaduan publik mengadakan layanan interaksi seperti pencarian informasi dan pelayanan pengaduan	Skor Indikator Efisiensi Kebijakan Publik
----------------------------------	------------------------	---	---	--	--

		dan Aspirasi Publik	penyampaian keluhan pelayanan publik dan mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan kebijakan.		<p>Tahap 3: Sistem pengaduan publik bersifat transaksional dimana pelaporan dapat direspon oleh sistem dengan kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan</p> <p>Tahap 4: Sistem pengaduan publik menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik terintegrasi langsung dengan layanan per instansi pemerintahan</p> <p>Tahap 5: Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan perubahan lingkungan (kerja), teknologi dan kebutuhan instansi</p>	$\frac{(A+B+C)}{3}$
				Ketersediaan situs yang mengakomodasi aspirasi publik dalam pembuatan	<p>Tahap 1: Tidak ada sistem aspirasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan</p> <p>Tahap 2: Sistem aspirasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan bersifat manual</p> <p>Tahap 3: Sistem aspirasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menyediakan layanan dalam bentuk online</p> <p>Tahap 4: Sistem aspirasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menyediakan</p>	

			kebijakan	<p>layanan dalam bentuk online yang dapat dipantau kemajuannya</p> <p>Tahap 5: Sistem aspirasi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan perubahan lingkungan (kerja), teknologi dan kebutuhan instansi</p>
	Transparansi Peraturan Pemerintah	Perwujudan transparansi data yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat terhadap hukum yang ada.	<p>Ketersediaan sistem informasi kebijakan pemerintah (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – JDIH)</p>	<p>Tahap 1: Tidak ada sistem JDIH</p> <p>Tahap 2: Sistem JDIH menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi dan mengunduh produk hukum</p> <p>Tahap 3: Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi seperti merespon pengguna dalam diskusi terkait kebijakan</p> <p>Tahap 4: Sistem JDIH menyediakan layanan kolaborasi dimana pelayanan dokumen publik terintegrasi langsung dengan layanan per instansi pemerintahan</p> <p>Tahap 5: Sistem JDIH dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan perubahan lingkungan (kerja), teknologi dan kebutuhan instansi</p>
Total Skor				<p>Total Skor Variabel</p> <p>$A + B + C_x$</p>



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Penghitungan skor dilakukan dengan menjumlahkan skor-skor tiap variabel dan dirata-ratakan sesuai jumlah sub-variabel dalam variabel. Hasil ini kemudian akan dijadikan bobot skor variabel. Dalam GSCM oleh Supangkat (2018), ketercapaian akan dihitung menggunakan perhitungan dasar:

- *Ad hoc* memiliki tingkat ketercapaian 0–20%
- *Initiative* memiliki tingkat ketercapaian >20–40%
- *Scattered* memiliki tingkat ketercapaian >40–60%
- *Integrative* memiliki tingkat ketercapaian >60–80%
- *Smart* memiliki tingkat ketercapaian >80–100%

Dalam menghitung ketercapaian dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan bobot skor variabel-variabel (Pelayanan Publik, Birokrasi Pemerintah, dan Efisiensi Kebijakan Publik). Hasil penjumlahan bobot skor variabel akan ditotal dan dirata-rata. Hasil rata-rata skor menjadi acuan dalam penentuan ketercapaian *smart governance* di Kota Bandar Lampung.

Tabel 3.6 Hasil Akhir Analisis Skoring Penelitian

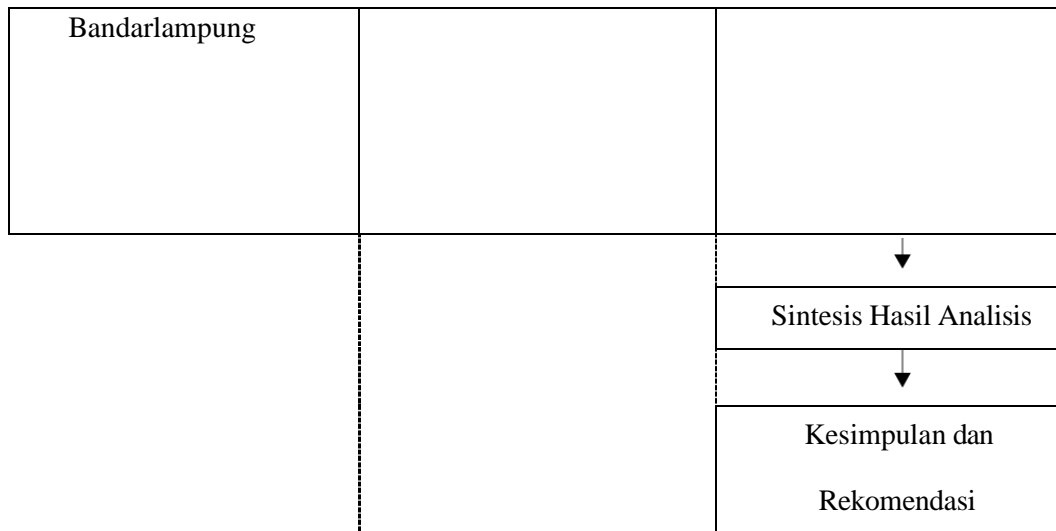
No	Interval	Keterangan Ketercapaian
1	$0 \geq x < 1$	(1) <i>Ad-Hoc</i>
2	$1 \geq x < 2$	(2) <i>Initial</i>
3	$2 \geq x < 3$	(3) <i>Scattered</i>
4	$3 \geq x < 4$	(4) <i>Integrated</i>
5	$4 \geq x < 5$	(5) <i>Smart</i>

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

3.2.7 Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis penelitian merupakan suatu rumusan dari masukan (input), proses, serta keluaran (output) dari penelitian. Masukan dari penelitian dapat berupa data, variabel dan indikator yang akan digunakan dan diperoleh dari kajian literatur. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, metode analisis digunakan di dalam bagan proses. Output yang berupa jawaban dari pertanyaan penelitian akan didapatkan melalui analisis yang telah dikerjakan. Kerangka analisis dari penelitian ini bisa dilihat pada gambar berikut:

Input	Process	Output
<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara Terkait Kebijakan Smart Governance di Kota Bandar Lampung • Data Program dan Kebijakan Terkait Smart Governance di Kota Bandar Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Deskriptif Kualitatif • Analisis Konten 	<ul style="list-style-type: none"> • Program dan Kebijakan Smart Governance di Kota Bandar Lampung
<ul style="list-style-type: none"> • Literatur Terkait Smart Governance • Literatur Evaluasi Smart Governance • Dokumen Kebijakan Evaluasi Smart Governance 	<p style="text-align: center;">Analisis Konten</p>	<p style="text-align: center;">Indikator Tingkat Ketercapaian Smart Governance</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Tingkat Ketercapaian Smart Governance • Program dan Kebijakan Smart Governance di Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skoring • Analisis Deskriptif Kuantitatif 	<p style="text-align: center;">Tingkat Ketercapaian Smart Governance di Kota Bandar Lampung</p>



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021

Gambar 1.2 Kerangka Analisis Penelitian